

MANAJEMEN SDM DALAM PENERAPAN KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA UMKM KOTA PANGKAL PINANG BERBASIS EKONOMI PANCASILA

Oleh:

Tsulis Amiruddin Zahri ¹⁾

Nanang Wahyudin ²⁾

Dini Oktariani ³⁾

Dony Yanuar ⁴⁾

Universitas Bangka Belitung, Bangka ^{1,2,3,4)}

E-mail:

Tsulis-amiruddin@ubb.ac.id ¹⁾

nanangwahyudin@gmail.com ²⁾

dinioktariani@gmail.com ³⁾

donyyanuar@gmail.com ⁴⁾

ABSTRACT

The year 2022 will be the revival of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia by contributing 61% of the national GDP and absorbing 97% of the total workforce. Based on the city area, MSMEs are one of the components that contribute 9.27% of economic growth in Pangkal Pinang City. However, the application of Intellectual Property (IP) in MSME business behavior has not been handled optimally. The purpose of this study is to identify human resource management in MSME actors in building a work team that is aware of IP in business activities. This study uses a qualitative-descriptive approach. Data were obtained by conducting observations and interviews with MSME business actors in Pangkalpinang City who have not or have registered their KI. The results of the study indicate that MSME actors have an awareness of the importance of IP in entrepreneurship. KI is assessed by SMEs to support business sustainability through the maturation of the three entrepreneurial teams they have. MSME actors in Pangkalpinang City have at least a production team, an operational team, and a marketing team. The three teams that are being developed are the marketing team, because they involve digital media capabilities. This means that the application of IP becomes a priority to avoid claims for the brand or type of business they have. In addition, MSME actors utilize family-based human resources. This character is in accordance with the implementation of the Pancasila economy.

Keywords: *Intellectual Property; MSMEs; HRM; Pancasila Economy*

ABSTRAK

Tahun 2022 menjadi kebangkitan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia dengan menyumbang 61 % terhadap PDB nasional dan menyerap 97 % dari total tenaga kerja. Berbasis wilayah kota, UMKM menjadi salah satu komponen yang menyumbang 9,27 % pertumbuhan ekonomi di Kota Pangkal Pinang. Namun, penerapan Kekayaan Intelektual (KI) dalam perilaku usaha UMKM belum tertangani secara maksimal. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi manajemen sumber daya manusia pada pelaku UMKM dalam membangun tim kerja yang sadar terhadap KI pada kegiatan usaha. Penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara kepada pelaku usaha UMKM di Kota Pangkalpinang yang belum atau pun sudah terdaftar KI-nya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM memiliki kesadaran pentingnya KI dalam berwirausaha. KI dinilai oleh Pelaku UMKM menunjang keberlanjutan usaha melalui pematangan tiga tim wirausaha yang mereka miliki. Pelaku UMKM di Kota Pangkalpinang minimal memiliki tim produksi, tim operasional, dan tim pemasaran. Tiga tim tersebut yang sedang dikembangkan adalah tim pemasaran, karena melibatkan kemampuan media digital. Artinya, penerapan KI menjadi prioritas untuk menghindari klaim merek atau jenis usaha yang mereka miliki. Selain itu, pelaku UMKM memanfaatkan SDM berbasis kekeluargaan. Karakter tersebut sesuai dengan penerapan ekonomi Pancasila.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual; UMKM; MSDM; Ekonomi Pancasila

1. PENDAHULUAN

Tahun 2022 menjadi kabar baik bagi UMKM di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena jumlah UMKM mencapai 64,2 juta yang menyumbang kontribusi pada PDB dengan persentase 61,07 dan mampu mengakomodir 97 % dari total tenaga kerja di masyarakat. Selain itu, hadirnya UMKM dapat mengumpulkan hingga 60,4 % dari total investasi (Hartanto, 2021). Keberadaan UMKM telah diakui eksistensinya sebagai bidang usaha yang vital. Hal tersebut dikarenakan UMKM memiliki peran besar memajukan perekonomian Indonesia. Hadirnya UMKM sebagai langkah solutif dalam mengurangi dan mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Berbagai keunggulan tersebut, ada hal yang tampaknya belum menjadi perhatian penting semua pihak. Masih ada UMKM yang memiliki berbagai kekurangan, salah satunya mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual (Sulasno, 2018).

Kekayaan Intelektual (KI) bagi

pelaku usaha (UMKM) umumnya dipahami sebagai asset penting bagi perusahaan sebab KI dikategorikan ke dalam asset tidak berwujud. Pada konteks berwirausaha, KI berperan penting mendorong berjalannya kegiatan usaha selain aset lainnya seperti Sumber Daya Manusia (SDM), dan keuangan. Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2008, KI tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha besar, melainkan berlaku juga bagi pelaku UMKM (Sudjana, 2021).

KI pada sektor UMKM yang dimiliki oleh pelaku usaha dapat dikatakan masih terbatas. Anggapan bahwa KI bukan kebutuhan penting dalam kegiatan usaha, membuat pelaku UMKM tidak banyak yang berminat mendaftarkan KI usahanya. Ada kondisi yang turut mendukung sebab tersebut yakni Perilaku UMKM Indonesia yang terbilang masih tradisional. Maka perlindungan KI atas produk atau pun desain produk UMKM nya belum menjadi prioritas. Ada juga faktor lain yang menjadi pendukung yakni aksesibilitas

untuk mendaftarkan KI tidak mudah. Ada kondisi koordinasi anar pelaksana di instansi pemerintah yang belum tertata dengan baik. Apalagi sosialisasi yang belum maksimal untuk perlindungan KI pada setiap produk UMKM (Sulasno, 2018).

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini berusaha mengidentifikasi pelaku UMKM di kota Pangkal Pinang dalam memahami pentingnya KI dalam kegiatan berwirausaha. Apalagi data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang menunjukkan bahwa pertumbuhan Ekonomi di Kota Pangkalpinang mengalami kenaikan signifikan di tahun 2021 sebesar 9,27 persen. Angka ini tidak lepas dari tinggi angka investasi di Kota Pangkalpinang. Ada 3 sektor yang menjadi kontributor utama meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi yaitu sektor perdagangan 24,59 persen, industri pengolahan 17,19 persen dan konstruksi 11,49 persen (Ari & Dedy, 2022). Maka bisa dikatakan UMKM turut menyumbang pada sektor perdagangan dan pengolahan.

Selain mengidentifikasi kesadaran terhadap KI, penelitian ini berusaha menganalisis daya tahan pelaku UMKM dalam menjaga keberlangsungan wirausaha mereka melalui komitmen tim kerja yang dimiliki. Apalagi di era serba teknologi, pelaku UMKM membutuhkan sinergi

dengan SDM yang beragam bidang disiplin ilmu.

Sekarang, pelaku usaha apabila apabila membutuhkan tim kerja bisa melakukan rekrutmen di media sosial dengan menyebutkan kualifikasi yang dibutuhkan dan menyantumkan kontak yang bisa di hubungi. Apabila telah mendapatkan yang sesuai kualifikasi, Langkah selanjutnya adalah melakukan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) supaya sesuai dengan visi dan misi pelaku usaha (Arifin & Haryanto, 2021). Namun, tantangan yang perlu dipahami dalam membangun tim kerja adalah komitmen dan kekompakan. Maka pelaku usaha yang membangun usaha dengan tim kerja dituntut memiliki bekal kepemimpinan.

Seorang pelaku UMKM yang posisinya adalah pemilik usaha idealnya memiliki kalimat motivasi, karena hal tersebut adalah kunci utama dalam mencapai target tim kerja. Dengan memberikan motivasi dalam bentuk kalimat, pemilik UMKM lebih menghemat waktu dan tenaga. Gaya kepemimpinan yang paling tepat dalam meningkatkan kinerja karyawan adalah dengan gaya kepemimpinan yang situasional. Hal tersebut cocok diterapkan dalam mencapai target UMKM (Putri & Setyaningrum, 2019).

Memahami dua topik di atas, maka

penelitian ini bertujuan untuk penerapan KI dan fungsi manajemen sumber daya manusia dalam pelaku UMKM dalam membangun usaha yang berkelanjutan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Secara bahasa manajemen berasal dari bahasa Inggris “management” yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan dan pengelolaan.¹ Secara istilah manajemen memiliki beberapa pengertian, yaitu:

- a. Menurut Harold Koontz & O’Donnell dalam bukunya yang berjudul “Principles of Management” mengemukakan, “Manajemen adalah berhubungan dengan pencapaian sesuatu tujuan yang dilakukan melalui dan dengan orang-orang lain”.
- b. Menurut George R. Terry dalam buku dengan judul “Principles of Management” memberikan definisi: “Manajemen adalah suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan pelaksanaan dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

mendapatkan hasil yang terpadu mengenai

- c. Menurut Encyclopedia of The Social Sciences, Manajemen diartikan sebagai proses pelaksanaan suatu tujuan tertentu yang diselenggarakan.

Sumberdaya manusia (SDM) dalam ensiklopedi bahasa Indonesia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan atau lembaga. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi atau lembaga sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu.

Menurut Hadari Nawawi mengenai pengertian Sumber Daya Manusia, yaitu:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan)
- b. Sumber Daya Manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
- c. Sumber Daya Manusia adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (non material/non financial) di dalam

organisasi bisnis, yang dapat (real) secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Terry memberikan gambaran tentang fungsi manajemen dalam 5 kombinasi: 1. Perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), memberi dorongan (actuating), dan pengawasan (controlling). 2. Perencanaan, pengorganisasian, memberi motivasi (motivating), dan pengawasan. 3. Perencanaan, pengorganisasian, staffing, memberi pengarahan, dan pengawasan. 4. Perencanaan, pengorganisasian, staffing, memberi pengarahan, pengawasan, inovasi, dan memberi peranan. 5. Perencanaan, pengorganisasian, memberi motivasi, pengawasan dan koordinasi.

Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Indonesia telah menyatakan diri untuk ikut serta dalam organisasi perdagangan dunia World Trade Organization (WTO) 1994. Memasuki era ekonomi ASEAN memberikan dampak terhadap banyaknya investasi asing di Indonesia. Negara yang menjadi mitra dalam berdagang membutuhkan perlindungan hukum atas asset kekayaan intelektual. Hal ini merupakan implikasi dari bergabungnya Indonesia dalam WTO dan perlu untuk

diwujudkan menjadi potensi nyata merespon. The Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights dan mengeluarkan serangkaian peraturan yang berkaitan dengan HKI. Adapun tujuan dibentuknya perundangan terkait HKI bukan hanya untuk perusahaan besar melainkan juga untuk industri kreatif, Usaha Kecil, dan Menengah (UKM).

HKI merupakan hasil proses kemampuan berpikir manusia yang menjelma ke dalam suatu ciptaan atau penemuan. Ciptaan atau penemuan tersebut merupakan suatu kepemilikan atasnya karena bersumber dari akal manusia (Budi Asri, 2020: 134). HKI merupakan hak yang berasal dari hasil oleh pikir atau kreasi manusia yang pada akhirnya menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Sederhananya, HKI ini dapat diartikan sebagai hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.

Kekayaan Intelektual merupakan kunci persaingan serta pengembangan suatu usaha. Pengertian HKI tidak berhenti pada Perlindungan bisnis semata, tetapi juga untuk menjaga suatu usaha terhindar dari sengketa HKI. UKM merupakan industri kreatif yang memproduksi produk atau jasa kreatif. Sebagai karya kreatifitas produk yang dihasilkan berupa karya

intelektual yang perlu mendapat sehingga perlu adanya perlindungan hukum. Industri ekonomi kreatif mempunyai karakteristik berbeda dengan industri pada khalayak umum. Jenis industri ini memiliki keterikatan dalam proses perwujudan suatu produk atau jasa yang berasal dari ide atau gagasan (Intellectual Property). Industri kreatif memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi kesejahteraan dan lapangan pekerjaan masyarakat serta terbukti dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Basis Teori Yang Mendasari Ekonomi Pancasila

Paradigma pertumbuhan ekonomi dikritik oleh berbagai pihak. Todaro dan Smith (2003) menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak dengan sendirinya diikuti oleh pertumbuhan atau perbaikan distribusi keuntungan bagi segenap penduduk. Pertumbuhan yang cepat berakibat buruk kepada kaum miskin, karena mereka akan tergilas dan terpinggirkan oleh perubahan struktural pertumbuhan modern.

Baudrillard (2011) mengkritik secara tajam ideologi pertumbuhan. Ia menyatakan bahwa ideologi pertumbuhan hanya menghasilkan dua hal, yaitu kemakmuran dan kemiskinan. Makmur bagi yang diuntungkan dan miskin bagi yang dipinggirkan. Ia juga bahwa menyebut pertumbuhan sebagai fungsi

penghargaan yang memiliki nilai ekonomi kemiskinan. Ideologi pertumbuhan mengarah kepada pemiskinan psikologis dan kefakiran sistemik karena kebutuhan kerap melampaui batas produksi.

Konsumsi melampaui produksi mengkonsumsi tanpa henti, rakus dan serakah. Baudrillard menjelaskan kritiknya ini dalam bukunya berjudul Masyarakat Konsumsi (*La société de consommation*), di mana tidak ada masyarakat yang disebut berkecukupan, semua masyarakat mengkombinasikan eksekutif struktural dan kefakiran struktural. Menurutnya, manusia hidup dalam masyarakat pertumbuhan.

Namun, pertumbuhan itu kian tak mendekati manusia pada masyarakat berkecukupan. Pertumbuhan memproduksi kemakmuran dan pertumbuhan. Kenyataannya, pertumbuhan adalah fungsi kemiskinan; pertumbuhan diperlukan untuk membatasi gerak orang-orang miskin dan memelihara sistem. Pertumbuhan masyarakat, hakikatnya adalah lawan dari masyarakat berkecukupan. Pertentangan yang berlangsung di dalamnya berimbas pada pemiskinan psikologis dan kefakiran sistematis karena kebutuhan akan kerap melampaui produksi barang.

Heinberg (2011) dengan tegas menyatakan bahwa ada tiga faktor utama

yang akan mengakhiri pertumbuhan ketersediaan sumberdaya vital, termasuk energi fosil dan mineral; (ii) Degradasi lingkungan sebagai dampak dari ekstraksi sumberdaya dan penggunaan sumberdaya (termasuk penggunaan bahan bakar fosil), dan, (iii) Kekacauan finansial yang disebabkan ketidakmampuan sistem moneter, perbankan, dan investasi saat ini untuk membiayai pemulihan sumberdaya dan kerusakan lingkungan akibat pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2008, Presiden Prancis Nicolas Sarkozy, mempertanyakan kesahihan model pertumbuhan ekonomi. Sarkozy pun lalu membentuk Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress (CMEPSP). Komisi ini dipimpin oleh Profesor Joseph E. Stiglitz dari Columbia University, sedangkan Profesor Amartya Sen dari Harvard University ditunjuk sebagai Ketua Penasehat Komisi. Sementara, Profesor Jean-Paul Fitoussi dari Sciences-Po (Institut d'Etudes Politiques de Paris) yang juga Presiden lembaga penelitian elite Prancis (Observatoire des Conjonctures Economiques, OCE), menjadi Koordinator Komisi. Komisi tersebut bertugas merevisi berbagai ukuran kinerja ekonomi yang dinilai sudah tidak memadai, terutama pengukuran PDB. Komisi tersebut

ekonomi, yaitu: (i) Penurunan berhasil Menyusun Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress.

3. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Peneliti menggambarkan karakteristik atau fungsi masing-masing variabel dalam situasi tertentu tanpa melakukan tes hubungan atau pengaruh masing-masing variabel. Dipilihnya menggunakan metode kualitatif dikarenakan kondisi objek yang diteliti adalah alamiah. Peneliti sebagai instrument kunci dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara terbuka pada pelaku UMKM di Kota Pangkal Pinang. Analisis yang digunakan bersifat induksi dan menekankan makna dari situasi objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari hasil wawancara kepada pelaku UMKM di wilayah kota Pangkal Pinang. Peneliti mengidentifikasi kategori pada pelaku UMKM yang telah memiliki KI dan pelaku UMKM yang baru menyiapkan diri mendaftarkan KI bidang usahanya. Hasil analisis data disajikan dalam bentuk deskripsi sesuai sub pokok bahasan yang disusun dalam kajian

Pustaka.

4. HASIL dan PEMBAHASAN

Temuan Penelitian

Penelitian dilakukan kepada pelaku UMKM dengan kategori sudah memiliki KI dan sedang menyiapkan diri memiliki KI. Adapun UMKM yang dilakukan observasi dan wawancara adalah bidang usaha jasa dan bidang kuliner (makanan dan minuman). mereka tersebar di wilayah Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya. Hasil temuan oleh peneliti diidentifikasi berdasarkan topik berikut:

a) Kesadaran Terhadap Usaha dan Identitas Produk

Kesadaran terhadap usaha dan identitas produk merupakan hal pertama yang diidentifikasi oleh peneliti. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana pelaku UMKM memiliki kemampuan mengenali diri dan tujuan dari wirausaha yang dibuat. Data yang diidentifikasi menunjukkan hasil sebagai berikut:

Informan 1, pelaku UMKM memiliki usaha bidang jasa penyewaan alat berkemah. Kegiatan UMKM tersebut berawal dari hobi. Sehingga kemampuan mengenali dan modal peralatan sudah dimiliki. Pemilihan nama produk memperhatikan kondisi geografis wilayah Bangka.

Informan 2, pelaku UMKM memiliki

usaha makanan ringan. Kemampuan memproduksi teridentifikasi inovatif dengan merek produk yang unik dan mudah disebut berbagai kalangan. Sehingga pelaku UMKM sadar pentingnya segera mendaftarkan sebagai KI.

Informan 3, pelaku UMKM memiliki usaha kue kering. Kemampuan memproduksi ter-identifikasi menjadi produk yang diminati umum. Usaha untuk mendaftarkan KI dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi dan prosedur. Artinya, pelaku UMKM memiliki kesadaran terhadap pentingnya wirausahanya adalah KI yang perlu teregistrasi.

Informan 4, pelaku UMKM memiliki keseriusan dalam menentukan nama jasa. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaku melakukan konsultasi pada pihak profesional dalam memberi saran terbaik untuk nama jasa untuk bidang fotografi. Melalui nama tersebut, kemudian pelaku UMKM mengidentifikasi konsumen dan jenis layanan yang dipilih. Artinya kesadaran dalam dunia usaha dan identitas produk tidak diragukan.

Informan 5, pelaku UMKM sudah mendaftarkan nama usahanya sebagai KI. Bidang usahanya adalah produk makanan ringan. Nama yang dinilainya unik membuat pelaku UMKM memiliki kesadaran untuk segera mendaftarkan ke

HAKI. Produk makanan ringan yang sehingga potensi pasarnya teridentifikasi menjanjikan.

b) Kemampuan MSDM

Kemampuan MSDM diidentifikasi berdasarkan kemampuan pelaku UMKM mengelola sumber daya manusia yang dimiliki. Mulai dari kemampuan menginventaris tim kerja apa saja yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan UMKM-nya. Berdasarkan hasil temuan diperoleh data sebagai berikut:

Informan 1, pelaku UMKM telah berhasil menginventaris kebutuhan tim. Bidang usaha jasa yang dimiliki belum maksimal mengelola media sosial dan terbatas kemitraan. Media sosial dinilai penting karena mendukung promosi dan menarik pengguna jasa. Sayangnya, pelaku UMKM belum memiliki tim yang profesional untuk mengelola media sosial. Terkait kemitraan, pelaku UMKM memiliki misi untuk bisa bergabung dalam komunitas yang sesuai bidang dan bekerjasama dengan stakeholder yang mendukung jasanya. Namun upaya tersebut belum maksimal diperoleh.

Informan 2, pelaku UMKM memiliki kemampuan mengelola MSDM dengan baik. Hal tersebut teridentifikasi dari kesadaran untuk membagi beban kerja ke dalam tiga tim yaitu, tim produksi, tim pemasaran, dan tim pelayanan. Jumlah

dimiliki merupakan jajanan populer, tenaga kerja belum ideal, karena untuk memenuhi tiga bagian MSDM tersebut diisi oleh orang yang sama dengan situasi dan waktu yang terorganisir.

Informan 3, kemampuan MSDM teridentifikasi berdasarkan cara pelaku UMKM menjelaskan standar operasional pelaksanaan, perekrutan tim kerja sesuai kualifikasi, dan evaluasi berkala dalam menjalankan kegiatan wirausahanya.

Informan 4, kemampuan MSDM teridentifikasi berdasarkan cara pelaku UMKM menjelaskan kemampuan mengelola tim kerja tetap dan tim kerja non tetap. Ada skema yang dibuat sistematis untuk memastikan bahwa tim kerja non tetap berdasarkan kualifikasi dan kebutuhan yang sesuai dengan visi dan misi pelaku UMKM.

Informan 5, kemampuan MSDM teridentifikasi berdasarkan penjelasan dari pelaku UMKM mengenai sinergi antara tim produksi, tim pemasaran, dan tim distributor. Kemampuan MSDM oleh pelaku UMKM memiliki berbagai kendala, terutama dalam mengelola tim distributor yang belum sesuai dengan kemampuan pelaku UMKM menentukan batas maksimal harga produk. Tingginya biaya tim distributor membuat harga tidak bisa kompetitif. Sehingga produk masih tersebar di wilayah terdekat dari tempat produksi. Namun, sinergi dengan mitra

usaha di luar kota, membuat produk bisa

c) Kepemimpinan Usaha

Kepemimpinan dalam berwirausaha menjadi salah satu faktor penting dalam menjamin keberlangsungan wirausaha. Apabila seorang pelaku usaha memiliki kepemimpinan diri yang berkarakter dan memiliki daya juang tinggi, maka turut menentukan masa depan wirausahanya. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan hasil temuan sebagai berikut:

Informan 1, kepemimpinan yang dimiliki oleh pelaku UMKM teridentifikasi mampu mengelola kelemahan dan kelebihan produk, memahami pesaing, dan membaca peluang usaha. Sehingga dapat membuat peta langkah untuk menjalankan wirausahanya.

Informan 2, kepemimpinan yang ditunjukkan bersifat egaliter. Pelaku UMKM sebagai pemilik dan pemegang merek produk terbuka membangun tim kerja dan model bisnis yang lebih berkelanjutan. Pelaku UMKM aktif membangun kemitraan dan bergabung dalam komunitas atau asosiasi di bidang usaha yang beragam.

Informan 3, pola kepemimpinan bergaya partisipatif. Kemampuan untuk mengambil keputusan dan mengelola dinamika tim kerja dengan pembagian beban kerja dan upah yang sesuai kinerja

dikenal di daerah lain.

me-nunjukkan bahwa pelaku UMKM mampu mengorganisir kegiatan sistematis. Namun aspek gotong royong tetap diutamakan dalam menjalankan usahanya.

Informan 4, pelaku UMKM memiliki bidang usaha yang sudah dirintis dan disiapkan semenjak menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Sehingga kepemimpinannya teridentifikasi mampu membaca peluang usaha dan bagaimana mengelola SDM yang dimiliki. Kepemimpinannya bersifat fleksibel, namun visioner. Hal ini terlihat dari pengalaman usahanya yang mengalami berbagai skema untuk tetap bisa diterima konsumen.

Informan 5, pelaku UMKM memiliki kemampuan kepemimpinan yang strategis. Memiliki HAKI adalah keunggulan produk yang potensial untuk bermitra dengan asosiasi dan pemerintah daerah. Tantangan kepemimpinannya adalah bagaimana mem-berdayakan tim kerja yang bergantung pada distribusi produk.

Pembahasan

Hasil temuan penelitian mengenai pelaku UMKM dalam penerapan KI dan MSDM telah menghasilkan tiga kategori dalam menjalankan wira-usaha yakni, pengenalan terhadap produk atau jasa, kemampuan MSDM, dan kepemim-pinan

usaha. Tiga kategori tersebut tidak terlepas sebagai pemilik atau tim kerja. Tiga kategori tersebut apabila dibahas dalam aspek penerapan KI, MSDM, dan Ekonomi Pancasila, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Penerapan KI dalam Kekuatan Produk dan Jasa

Aspek penerapan KI mulai disadari dan dinilai penting oleh pelaku UMKM adalah kondisi yang seharusnya difasilitasi dengan baik oleh pemerintah daerah setempat atau fasilitator UMKM. Penerapan KI menjadi kompetisi yang tidak lagi bisa dihindari apabila pelaku UMKM ingin berkembang dan bertahan sebagai produk yang legal. Maka KI bukan lagi sebuah opsi dalam kegiatan wirausaha, melainkan satu langkah strategis yang perlu menjadi prioritas bagi pelaku UMKM.

Dalam berbagai praktek wirausaha, KI sebuah acuan bahwa produk atau jasa yang dibuat adalah hasil kreativitas pelaku UMKM. Sehingga menjadi hal yang perlu dijaga dan dilindungi dari kepemilikan. Penekanan pada hasil kreativitas pelaku UMKM inilah yang membuat penerapan KI sebagai bagian dari aspek yang jangan diabaikan bagi kegiatan wirausaha, apalagi bagi pelaku UMKM yang baru memulai atau merintis usaha. Penerapan KI juga berpotensi berdampak pada peningkatan

dari bagaimana pelaku UMKM baik penghasilan apabila ada mekanisme membuka cabang usaha atau dagang merek untuk mengembangkan bisnis dengan melibatkan pihak lain (Kemenparekraf, 2021).

Penerapan KI bagi pelaku UMKM di kota Pangkal Pinang sesuai dengan hasil temuan penelitian menjadi solusi bagi pengembangan usaha untuk menembus pasar global. Karena dianggap memenuhi syarat untuk tidak dianggap sebagai produk atau jasa yang melanggar merek dagang. Keadaan ini tentu menguntungkan bagi pelaku UMKM yang punya visi besar untuk usahanya. Apalagi kalau tergabung atau terlibat dalam berbagai aktivitas yang diinisiasi oleh pemerintah melalui Bekraf (Kemenparekraf, 2021).

Berdasarkan temuan penelitian, maka pelaku UMKM di kota Pangkal Pinang sudah tergolong sebagai kegiatan wirausaha yang sadar terhadap pentingnya KI. Bahkan mereka menganggap KI adalah hal yang penting selain MSDM dan keuangan. Kesadaran terhadap KI tentu menunjang bagi pelaku UMKM di Kota Pangkal Pinang untuk mengembangkan kegiatan wirausahanya dan memudahkan pemerintah daerah setempat apabila memiliki program pendaftaran KI secara masal. Maka tantangannya adalah bagaimana pemerintah daerah setempat memiliki komitmen untuk mendukung

secara sistematis pelaku UMKM dengan

b) MSDM pelaku UMKM

Menjawab tantangan industry 4.0

Kemampuan dalam MSDM bagi pelaku UMKM menjadi aplikatif ketika pengelolaannya sudah tim kerja. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kota Pangkal Pinang minimal memiliki tim produksi dan tim pemasaran. Kemampuan pelaku UMKM untuk memproduksi barang atau memberikan jasa terkait erat dengan kemampuan membuat konten promosi di media sosial. Artinya MSDM yang dominan perlu ditingkatkan kuantitas atau kualitas minimal terkait dengan kedua tim tersebut.

MSDM sebagai bagian dari era revolusi industri 4.0 menjadi sarana yang wajib dilakukan oleh UMKM. Pelaku UMKM sekaang sudah bergantung pada teknologi. Pandemi Covid-19 yang sempat terjadi, menjadi momentum bagi pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital sebagai dampak larangan interaksi fisik. Meskipun sekarang sudah ada pelonggaran, namun upaya peningkatan pendapatan bagi kegiatan wirausaha bisa dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi. MSDM juga termasuk cepat dalam memahami kebutuhan dari konsumen melalui penggunaan aplikasi yang

kemudahan akses dan kebutuhan lainnya.

mempertemukan penjual dan pembeli secara digital (Chalimi, Herdinawati, & Asadi, 2021).

Kondisi tersebut sesuai dengan hasil temuan penelitian. Para pelaku UMKM di Kota Pangkal Pinang memiliki prioritas untuk mengelola media sosial sebagai upaya pemasaran produk dan jasa mereka. Kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang mumpuni di bidang jasa pemasaran di media sosial dan website tidak terhindarkan. Menjadi nilai tambah tersendiri apabila pelaku UMKM memiliki kemampuan mengelola konten pemasaran di media sosial. Akan tetapi menjadi kendala apabila butuh sinergi dengan sumber daya manusia selain dirinya. Maka kemampuan untuk MSDM menjadi hal dasar yang perlu dimiliki.

c) Strategi kegiatan UMKM mewujudkan Ekonomi Pancasila

Terakhir, pola kepemimpinan sejatinya melekat dimiliki oleh pelaku UMKM yang berstatus sebagai pemilik atau tim pendiri perlu diidentifikasi secara terukur. Pelaku UMKM penting mempelajari pola kepemimpinan diri. Hal tersebut bisa dipelajari melalui keaktifan terlibat dalam seminar atau pelatihan yang dilakukan oleh orang berkompetensi.

Pemimpin mempunyai peran penting dalam budaya organisasi, khususnya

kegiatan UMKM. Pemimpin menciptakan melalui pengamatan keadaan sekitar, kemudian mewujudkan dalam bentuk ide dan gagasan, serta tindakan untuk maju. Manajer dalam perubahan adalah salah satu peran penting sebagai pelaku UMKM (Fitri & Ramadhayanti, 2022).

Peran-peran tersebut apabila dikaitkan dengan ide dasar dari Ekonomi Pancasila yang digagas adalah bagaimana pelaku UMKM mampu bersinergi dengan berbagai lingkungan yang mendukung keberlangsungan usaha. Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang tergali dan terbangun berdasarkan nilai-nilai yang telah dianut oleh masyarakat Indonesia. Ada beberapa prinsip dasar dalam sistem ekonomi Pancasila, salah satunya adalah diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan dan keadilan. Hal tersebut adalah disiplin ilmu ekonomi untuk melakukan alokasi sumber daya terbatas guna dipakai secara masuk akal sehingga dapat mencapai hasil maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia (Hasan & Mahyudi, 2021).

Hasil temuan penelitian telah teridentifikasi bahwa pelaku UMKM tidak menjalankan usahanya secara personal. Minimal kegiatan usaha tersebut dikerjakan bersama anggota keluarga. Apabila ketika usaha tersebut dikelola dengan aplikasi digital, maka melibatkan kemampuan mengelola pengupahan

perubahan untuk keberlangsungan usaha supaya semua berjalan dengan maksimal.

Melalui pemahaman Ekonomi Pancasila, maka semangat gotong royong dan kekeluargaan lebih kuat dibandingkan semuanya dikelola dengan sistem pemilik dan pekerja. Meskipun tak bisa dipungkiri bahwa pemilik usaha memiliki porsi yang lebih dominan, namun semangat membangun usaha bersama akan menghasilkan ekosistem usaha yang lebih berdampak saling menguntungkan.

5. SIMPULAN

Penerapan KI dan MSDM dalam kegiatan UMKM adalah dua aspek yang melekat. KI mampu menumbuhkan rasa percaya diri dan rasa aman bagi pelaku UMKM dalam kegiatan produksi, pemasaran, dan kemitraan. Aspek MSDM menjadi pembuktian bagi pelaku UMKM bahwa kegiatan wirausaha yang dijalankan memiliki masa depan usaha yang berkelanjutan. Sebagian besar pelaku UMKM mengerti pentingnya menjaga ekosistem tim kerja yang solid dan saling terintegrasi. Kemampuan kepemimpinan pelaku UMKM dalam mengelola sinergi antara tim produksi, tim pelayanan, tim pemasaran, dan pengelolaan keuangan menuju ke arah yang profesional. Apalagi, pelaku UMKM memahami bahwa tim pemasaran adalah orang-orang

yang memiliki kemampuan media digital. membutuhkan penerapan KI dan MSDM yang maksimal. Ini menjadi peluang bagi geliat pertumbuhan ekonomi yang berbasis Pancasila di Kota Pangkal Pinang. Tidak hanya menjadi penyumbang angka pertumbuhan ekonomi, melainkan kesempatan untuk menggerakkan rasa kebersamaan dan gotong royong di lingkaran sosial sampai di tingkat paling kecil yakni keluarga.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ari, & Dedy. (2022, Juli 14). Pertumbuhan Ekonomi Di Pangkalpinang Naik Signifikan 9,27 Persen. (F. Yanto, Editor, & Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang) Retrieved from <https://website.pangkalpinangkota.go.id/>
<https://website.pangkalpinangkota.go.id/pertumbuhan-ekonomi-di-pangkalpinang-naik-signifikan-927-persen/>
- Arifin, S. R., & Haryanto, R. (2021). Peran manajemen sumber daya manusia (msdm) melalui usaha mikro kecil dan menengah (umkm) untuk penguatan ekonomi. *KINERJA*, 18(3), 425-430.
- Chalimi, A. N., Herdinawati, S., & Asadi. (2021). Faktor Kemajuan Teknologi Dan Sumber Daya Manusia Artinya, era media digital Terhadap Peningkatan Pendapatan Umkm Era Revolusi 4.0. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 9(2), 129-134.
- Fitri, S., & Ramadhayanti, G. (2022). Tinjauan Aspek Kepemimpinan Dalam Perubahan Budaya Organisasi. *JENIUS: Jurnal Ilmiah Sumber Daya Manusia*, 5(3), 532-542.
- Hartanto, A. (2021, Mei 05). UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia. (H. Limanseto, Editor, & Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Retrieved from <https://ekon.go.id/>:
<https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>
- Hasan & Mahyudi. (2021). Konsep Ekonomi Pancasila. *JURNAL LISAN AL-HAL*, 15 (1), 141-160
- Hastangka. (2012). Filsafat Ekonomi Pancasila Mubyarto. *Jurnal Filsafat*, 22(1), 31-50.
- Kemenparekraf. (2021, Oktober 19). Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif. Retrieved from <https://www.kemenparekraf.go.id/>:
<https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Pentingnya-Pemahaman-Hak-Kekayaan->

- Intelektual-dalam-Ekonomi-Kreatif Negara, UGM, Jati Diri Bangsa. Yogyakarta: Aditya Media & PUSTEP UGM.
- Putri, S. A., & Setyaningrum, F. (2019). Pengaruh Kalimat Motivasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan. *OPTIMA*, 3(1), 70-79.
- Roisah, K. (2015). Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa. Malang: Setara Press.
- Sedarmayanti. (2017). Perencanaan dan Pengembangan SDM Untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja, dan Produktivitas Kerja. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sudjana. (2021). Potensi Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(1), 51-69. doi:<https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.534>
- Sulasno. (2018). Penerapan Kekayaan Intelektual (KI) Terhadap UMKM sebagai Upaya Mewujudkan Persaingan Bisnis Berkeadilan. *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 173-186.
- Utomo, A. P., & Suciningtyas. (2015). Pemetaan Merek dan Desain Industri UMKM Berpotensi HKI di Mubyarto. (2004). Pancasila Dasar Kabupaten Kudus Berbasis Sistem Informasi Geografis Menggunakan Google MAP API. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (SENDI_U). Semarang: Kajian Multi Disiplin Ilmu untuk Mewujudkan Poros Maritim dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat.
- Zainal, V. R., Ramly, M., Mutis, T., & Arafah, W. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.